

## **KAJIAN MODEL PENGUKURAN PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM RANGKA MENDUKUNG OTONOMI DAERAH (2003)**

Sesuai dengan jatidirinya, koperasi sebagai badan usaha harus memenuhi kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga koperasi mampu berperan sebagai sentra media bagi para anggotanya dan meningkatkan kesejahteraannya, terutama dikaitkan dengan otonomi daerah, koperasi harus responsif dan aktif dalam menghadapi tantangan yang dapat diubah menjadi suatu peluang.

Sebagai perwujudan dari kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi, pemerintah melalui eks Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM) telah melakukan langkah pembinaan manajemen, pembiayaan, dan pendistribusian informasi pasar kepada koperasi yang dikumpulkan dalam suatu strata atau area tertentu. Aktivitas ini disebut dengan langkah nyata, yang saat ini diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan yang potensial dalam meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya diskusi informasi, serta tingkat kompetisi dan eksistensi yang tinggi dari pelaku usaha yang berada dalam sentra/klaster tersebut.

Penyediaan sumberdaya permodalan yang memadai, tepat waktu serta jumlah sesuai dengan kebutuhan, merupakan salah satu faktor yang menentukan iklim sehat bagi pengembangan koperasi. Hal ini mengingat 47,5 persen industri kecil dan 3,40 persen industri kerajinan rumah tangga mengalami kesulitan modal usaha, di mana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan kesulitan mendapatkan bahan baku, pemasaran, maupun keterampilan tenaga kerja. Karena itu, fasilitas investasi/permodalan merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk dikedepankan bagi pengembangan koperasi, merupakan salah satu paket kebijakan yang berupa dukungan finansial bagi pengembangan koperasi di samping

dukungan nonfinansial dalam bentuk penyediaan jasa oleh Layanan Pengembangan Bisnis (LPB), serta dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah berupa penyaluran kredit dengan pendekatan koperasi, terutama dalam meningkatkan peran, perlu dilakukan suatu perhitungan yang dapat mengukur tingkat produktivitas investasi yang dilakukan oleh koperasi. Dengan demikian, perbandingan antara investasi yang disalurkan dengan output yang dihasilkan dapat diketahui. Jadi, apabila tingkat output tertentu harus dicapai oleh koperasi, maka pemerintah dapat mengetahui besaran jumlah kredit yang perlu disalurkan. Dengan penyusunan besaran investasi, maka dapat teridentifikasi koperasi yang tergolong dalam kelompok *labor intensive* atau *capital intensive*.

Program evaluasi kinerja koperasi yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan perlu dikembangkan melalui kegiatan pemantauan dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu dilaksanakan suatu kegiatan survai khusus koperasi yang ditujukan untuk memantau tingkat kinerjanya, baik yang berkaitan dengan aspek mikro yang berhubungan dengan manajemen koperasi secara individual, maupun aspek mikro yang menyangkut peran kelembagaan dalam perekonomian nasional.

Program tersebut akan ditempuh melalui dua pendekatan. Pertama, pengukuran kinerja koperasi terpilih dengan mengamati serta memantau perkembangan beberapa indikator mikro selama tahun 2001 dan 2002. Indikator mikro yang dimaksud adalah rasio-rasio finansial yang meliputi: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, serta koperasi sebagai pihak yang menyalurkan kredit dana kepada anggota. Melalui hasil pengukuran rasio-rasio finansial tersebut dapat dilakukan analisis tentang kinerja koperasi dalam mengembangkan usahanya selama 2 periode akuntansi, 2001

dan 2002. Kedua, melalui pendekatan makro akan diukur tingkat kemampuan koperasi dalam menciptakan nilai tambah, atau dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2001 dan 2002. Besarnya PDB yang dihasilkan oleh koperasi akan memperlihatkan peran dan sumbangan unit usaha tersebut dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kekuatan finansial koperasi. Selain itu, hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah, sebagai acuan untuk rekomendasi program pembinaan koperasi.

Tujuan dari kajian ini adalah: a) mendapatkan informasi tentang perkembangan koperasi penerima dana dari segi perkembangan usaha, modal sendiri/modal disetor, aset, pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diterima, simpanan anggota, jumlah peminjam, jumlah penyimpan dan kualitas pinjaman, serta mutu pelayanan; b) mendapatkan informasi tentang kemampuan koperasi dan penyediaan modal (investasi) sendiri; c) memperoleh informasi tentang perkembangan kinerja koperasi penerima dana dari keluaran (produk baru, usaha baru, volume usaha, nilai tambah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan sebagainya); d) memperoleh informasi tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peran koperasi melalui program bantuan dana.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kajian ini adalah model pengukuran perkembangan koperasi dalam rangka mendukung otonomi daerah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mendukung otonomi daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan atau rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik oleh pihak terkait di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kajian ini dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan secara sekunder dan primer ditabulasi, diolah dan diambil sesuai dengan dua pendekatan, yaitu secara makro

dan mikro. Adapun kinerja koperasi diukur dengan melihat rasio likuiditas, profitabilitas, solabilitas dan rentabilitas. Di samping itu diukur juga nilai tambahnya.

Hasil kajian menunjukkan:

1. Program pemerintah tentang perkuatan permodalan melalui bantuan dana yang dikucurkan kepada koperasi berjalan lancar dan baik;
2. Penambahan dana bagi koperasi sangat membantu dan pengaruhnya sangat positif untuk meningkatkan usaha, volume usaha (omzet), penyerapan tenaga kerja, penciptaan nilai tambah, meningkatkan produk, dan investasi;
3. Secara umum dampak dari penambahan dana kepada koperasi belum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap usaha yang telah dijalankan sebelumnya, karena keterbatasan dana yang disalurkan. Pada umumnya, koperasi penerima dana belum dapat memenuhi kebutuhan dana bagi keseluruhan anggotanya;
4. Pinjaman dana ini umumnya dapat tersalurkan ke anggota, kendati demikian masih ada beberapa pengakuan koperasi yang tidak cocok dengan pengakuan anggota penerima dana mengenai besaran nilai rupiah yang dipinjamkan;
5. Harapan dari koperasi agar kiranya pemerintah dapat memberikan dana pendamping yang lebih intensif dan tenaga pendamping yang telah berpengalaman. Dengan adanya bentuk pembinaan yang berkesinambungan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, diharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk melihat usaha secara nyata. Demikian pula pada bimbingan, pemerintah dapat menyediakan semacam peralatan yang digunakan, di samping dana seperti yang sedang berjalan.

Secara garis besar untuk mengoptimalkan primer koperasi direkomendasikan, bahwa pemerintah mau memberikan bantuan dana yang lebih besar dari yang sekarang diterima dengan bunga yang relatif lebih rendah dan disertai dengan pembinaan.